

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia konstruksi saat ini begitu pesat. Hal tersebut bisa dilihat dari banyaknya perusahaan jasa konstruksi di Indonesia saat ini, mulai dari perusahaan kecil sampai perusahaan yang besar. Perusahaan jasa konstruksi merupakan salah satu sektor penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terutama pengaruh dalam pembangunan infrastruktur yang baik dan berkualitas (Gunasti, Amri, 2017). Menurut data dari Badan Pusat Statistik, sampai pada tahun 2016 tercatat sebanyak 142.852 perusahaan jasa konstruksi di Indonesia. Banyaknya perusahaan jasa konstruksi yang tersedia juga harus diimbangi dengan kualitas tenaga kerjanya.

Tenaga kerja merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan suatu proyek karena pengaruhnya cukup besar terhadap waktu dan biaya pelaksanaan suatu proyek (Harahap & Syahrizal, 2017). Tenaga kerja yang dimaksud disini adalah sebuah kelompok kecil yang terdiri dari tukang, pembantu tukang atau pekerja, dan mandor (Budikusuma, Hargono D. P, & Agung Mas Rafael, 2010). Umumnya pembagian jenis tukang dilapangan dibagi atas 3 jenis yaitu tukang kayu, tukang pasang bata, dan tukang besi (Harahap & Syahrizal, 2017). Masing-masing tukang diberi tugas yang berbeda sesuai dengan kompetensinya. Dan tenaga kerja yang berkualitas adalah tenaga kerja yang terbukti kompetensinya sesuai dengan bidangnya dan telah melalui proses penilaian (Barclay & Wolff, 2012).

Dalam upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja agar memiliki kompetensi yang sesuai Standar Kompetensi Nasional Indonesia (SKKNI), pada tahun 2016 Kementerian PUPR telah menargetkan untuk mensertifikasi tenaga kerja terampil untuk 6 jabatan kerja, salah satunya yaitu tukang pasang bata (Sumarningsih, 2016). Karena pekerjaan pasangan bata merupakan pekerjaan yang memiliki volume pekerjaan dan tenaga kerja yang banyak untuk menyelesaikan pekerjaannya. (Mandani, 2010).

Kompetensi adalah bagian dalam dan selamanya ada pada kepribadian seseorang dan dapat memprediksi tingkah laku dan performansi secara luas pada semua situasi dan *job task* (Nurmianto, Siswanto, & Sapuwan, 2006). Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kinerja pada proyek konstruksi adalah kompetensi pekerja pada proyek konstruksi (Christina, Djakfar, & Thoyib, 2012). Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap tenaga kerja tertera di dalam SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) yang merupakan rumusan kemampuan kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (www.kemenperin.go.id).

Berdasarkan beberapa informasi di atas maka kesimpulan yang dapat diambil adalah setiap tenaga kerja konstruksi seperti tukang pasang bata wajib memahami serta menerapkan standar kompetensi yang sesuai SKKNI karena dampaknya akan berpengaruh pada pelaksanaan dalam bekerja. Namun, masih banyak tenaga kerja konstruksi yang masih minim terkait penguasaan kompetensi.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah tenaga ahli 10%, tenaga terampil 30%, dan tenaga tidak terampil 60%. Bila diuraikan dengan

tingkat pendidikan dari SD hingga perguruan tinggi, maka komposisi tenaga kerja konstruksi di Indonesia yang paling besar adalah tenaga kerja tidak terampil/kasar yaitu sekitar 76%. Pendidikan *unskilled labour* adalah SMP dan SD bahkan ada yang tidak tamat SD sedangkan pendidikan tenaga kerja terampil yaitu SMA dan SMK berjumlah 21% dan yang terakhir yaitu tenaga ahli hanya 3% - 4% saja jumlahnya (Rivelino, 2017).

Tenaga terampil bidang konstruksi adalah tenaga kerja dengan keahlian dalam bidang konstruksi dengan melalui pengalaman kerja yang cukup lama contohnya seperti mandor, *drafter*, dan *surveyor* (Khan, 2013). Lulusan Sekolah menengah Kejuruan (SMK) dapat digolongkan menjadi tenaga terampil karena sejak awal mereka masuk SMK sampai mereka lulus di didik dan di latih kemampuan *hard skill* dan *soft skill* nya. Hal ini karena lulusan SMK dinilai mempunyai keterampilan dasar dan relatif lebih cepat beradaptasi dengan kondisi lapangan (Almira & Dardiri, 2016). Oleh sebab itu, tenaga terampil seperti tukang, mandor, dan *drafter* yang dibutuhkan dalam pekerjaan konstruksi seharusnya berasal dari tingkat pendidikan minimal SMK karena sudah memiliki kompetensi yang di dapat selama belajar di SMK (Broad, 2016).

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu (Susanto, 2017). Senada dengan pendapat sebelumnya, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai salah satu model lembaga yang tujuannya adalah menyiapkan siswa memasuki dunia kerja dan menyiapkan siswa agar mampu berkompetensi dan mengembangkan diri (Winarno, 2009).

Kesimpulan yang di dapat adalah bahwa tenaga terampil seperti tukang pasang bata wajib memiliki kompetensi yang setara dengan kompetensi lulusan SMK dan juga disesuaikan dengan kebutuhan industri konstruksi saat ini. Untuk *unskilled labour* wajib mengikuti penyetaraan kompetensi agar tidak tertinggal jauh kompetensi yang dimiliki dengan tenaga kerja terampil. Untuk membantu para *unskilled labour* mendapatkan penyetaraannya maka dibutuhkan pedoman kompetensi seperti instrumen yang dapat menjadi acuan pengukuran kompetensi dan mencakup standar kompetensi yang ada dan juga sudah disesuaikan dengan kondisi dilapangan.

Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang berfungsi mengukur pencapaian kompetensi pekerja (Susila, 2012). Instrumen diperlukan untuk mengukur tingkat penguasaan kompetensi tenaga kerja konstruksi dengan melalui proses penilaian (Kreimeier & Greiner, 2019). Saat ini, lembaga konstruksi yang sudah membuat dan menggunakan instrumen sebagai acuan untuk uji sertifikasi tenaga kerja adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kementerian PUPR memiliki instrumen yang sudah dipublikasikan di situs resmi *sibima.pu.go.id* dan salah satu diantaranya adalah instrumen pekerjaan pemasangan bata.

Untuk mengetahui bahwa instrumen keterampilan tukang pasang bata milik Kementerian PUPR bisa dikembangkan, maka peneliti melakukan penelitian pendahuluan terlebih dahulu. Penelitian pendahuluan dilakukan bertujuan untuk membuktikan bahwa kompetensi yang terdapat pada instrumen milik Kementerian PUPR sudah sesuai dengan kompetensi yang ada di SMK Bangunan dan menyesuaikan dengan kondisi sebenarnya dilapangan.

Tahap awal dari Penelitian Pendahuluan ini adalah membawa Instrumen keterampilan tukang pasang bata milik Kementerian PUPR kepada 3 ahli yaitu satu ahli instrumen dan dua ahli materi. Setelah dilakukan justifikasi maka hasil yang didapat adalah: menurut ahli materi pertama mengenai beberapa butir pekerjaan yang jarang digunakan atau akan digunakan jika owner memesannya, pekerjaan tersebut adalah pemasangan bata dekoratif, dan juga pemasangan panel kaca. Sedangkan ahli materi kedua sependapat dengan ahli materi pertama jika memang butirnya menyesuaikan dengan kebutuhan dilapangan namun jika untuk kompetensi SMK sebaiknya ditambahkan saja tetapi hanya pemasangan kaca dan pemasangan bata dekoratif fungsinya adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa SMK dalam berkeaktifitas.

Pendapat yang berbeda diutarakan oleh ahli instrumen, ahli instrumen menyimpulkan jika instrumen milik Kementerian PUPR masih masuk dalam kategori sesuai. Namun ada sedikit saran yang diberikan oleh beliau yaitu untuk *performance test* sebaiknya menggunakan skala rangking atau *rating scale* yang berguna untuk memberikan penilaian yang lebih objektif dan dengan kriteria penilaian yang lebih jelas. (Hasil Penelitian Pendahuluan bisa dilihat dilampiran hal. 63)

Dari hasil penelitian pendahuluan, maka dapat disimpulkan bahwa Instrumen Keterampilan Tukang Pasang Bata milik Kementerian PUPR masih memiliki beberapa kekurangan yaitu ada beberapa yang bukan pekerjaan inti tetapi tetap dimasukkan kemudian belum memiliki kriteria penilaian yang jelas. Dengan adanya permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Pengembangan Instrumen Keterampilan Tukang Pasang Bata

yang nantinya akan disesuaikan dengan SKKNI Tukang Pasang Bata yang terbaru yaitu SKKNI Tukang Pasang Bata tahun 2016 serta menambahkan kriteria penilaian yang lebih jelas pada instrumen keterampilan tukang pasang bata rancangan dari peneliti serta memisahkan yang bukan pekerjaan inti.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Apakah instrumen yang ada sudah sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan tukang pasang bata?
2. Bagaimana menyusun instrumen yang dapat dijadikan sebagai standar acuan untuk mengukur kompetensi tukang pasang bata?

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas diperlukan pembatasan masalah sebagai berikut :

1. Instrumen yang akan dikembangkan menggunakan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) No. 317 Tahun 2016 tukang pasang bata.
2. Instrumen yang sudah ada digunakan sebagai penelitian pendahuluan untuk memperkuat latar belakang saja.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah tentang “Bagaimana mengembangkan instrumen keterampilan tukang pasang bata sesuai dengan kompetensi yang ada di SKKNI No. 317 Tahun 2016 tukang pasang bata?”.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini untuk mengembangkan Instrumen Keterampilan Tukang Pasang Bata sebagai acuan alat ukur yang dapat mengukur aspek kompetensi keterampilan tukang pasang bata.

1.6 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang berarti bagi lembaga dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi instrumen keterampilan pekerja konstruksi, khususnya keterampilan tukang pasang bata.

2. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti adalah menambah pengetahuan dan wawasan terkait kriteria keterampilan pekerja konstruksi, khususnya keterampilan tukang pasang bata yang sesuai dengan SKKNI.